

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011-2015

Muhammad Ikram
Email : ikramsp@gmail.com
Supervisor : Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil

Science of government Faculty of science social politic Riau University,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Not yet optimal performance of local government of Kuantan Singingi Regency in running the concept of Public Private Partnership in tourism development and the failure of local government of Kuantan Singingi Regency in encouraging investors to join in development of tourism area and government unable to utilize local media / national as a means to tourism promotion in Kuantan Singingi Regency. Therefore, it is then that underlie the author to find out more and intend to conduct research on Public Private Partnership in the Development of Tourism Potential in Kuantan Singingi Regency In the period 2011-2015.

What factors affect the Public Private Partnership in the development of tourism potential in Kuantan Singingi Regency. The purpose of the research is to know the Public Private Partnership in the development of tourism potential in Kuantan Singingi Regency. Qualitative research methods. This research was conducted in Kuantan Singingi Regency. Data sources are primary through interviews as well as secondary data sources. Data analysis technique is carried out with qualitative descriptive analysis. Currently Kuantan Singingi District Government has not implemented the concept of Public Private Partnership in developing and managing tourism sector in Kuantan Singingi regency. Inadequate management of facilities and infrastructure resulting in a lack of visiting tourists.

Promotion made by the Department of Tourism and Culture Kuantan Singingi regency about tourism events "pacujalur" and other tourist objects that have not been optimal, and the lack of socialization from the Department of Tourism and culture Kuantan Singingi district to the community about the culture and traditions that exist in Kuantan Singingi, Strategy Dinas Kebudayaan Tourism Youth and Sports Kuantan Singingi regency has not been done properly, This we can see from some existing strategies such as improving facilities and infrastructure both principal and supporting, direct or indirect promotion and work with the community, Of the three strategies there is no implemented maximally, very less in the implementation.

Keywords: Public Private Partnership and Tourism

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sector pariwisata di seluruh Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Setiap daerah hendaknya berlomba untuk mengembangkan diri dengan menggali potensi – potensi pariwisata yang dimiliki oleh masing – masing daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah serta pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah serta pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dibidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Untuk pengembangan pariwisata tersebut, banyak cara yang bias dilakukan. Salah satunya dengan program Kemitraan Pemerintah Swasta disingkat KPS atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Public Private Partnership* atau disingkat PPP atau P3 adalah bentuk perjanjian jangka

panjang belum maksimal untuk perjalanan yang menyenangkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi penyebab utamanya ialah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan konsep Public Private Partnership dalam pengembangan pariwisata dan tidak berhasilnya pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dalam mendorong para investor-invester untuk bergabung dalam pengembangan kawasan pariwisata serta tidak mampunya pemerintah dalam memanfaatkan media lokal/nasional sebagai sarana untuk promosi pariwisata di kabupaten Kuantan Singingi.

Oleh karena itu, hal inilah yang kemudian melandasi penulis guna mengetahui lebih lanjut dan bermaksud melakukan penelitian tentang “*Public Private Partnership dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi Pada Periode 2011-2015*”.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a) *Public-Private Partnership*

Public-Private Partnership (Kerjasama Pemerintah dengan Swasta/KPS atau Kontrak, antarainstansi pemerintah dengan badan usaha/pihak swasta, di mana:

- 1) Pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu
- 2) Pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Pihak swasta bertanggung jawab atas resiko yang timbul

akibat pelaksanaan fungsi tersebut.

- 4) Fasilitas pemerintah, lahan atau asset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak.

Masuknya pihak swasta melalui pola kemitraan dengan pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah (partnership, 2011 :6):

- 1) Tersedianya alternative berbagai sumber pembiayaan.
- 2) Pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat.
- 3) Berkurangnya beban (APBN/APBD) dan risiko pemerintah.
- 4) Infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak.
- 5) Kinerja layanan masyarakat semakin baik.
- 6) Akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan.
- 7) Swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial.

Bank Dunia (2012) misalnya, memberikan definisi *Public Private Partnership (PPP)* sebagai suatu kontrak jangka panjang antara pihak pemerintah dan swasta untuk menyediakan barang dan layanan publik, dimana pihak swasta menanggung resiko secara signifikan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan proyek kerjasama.

b). Pariwisata

Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”.Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara

berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar dapat mendalami tentang permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrument penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dil lapangan. Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk meneliti objek kejadiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Analisis data kualitatif ditempuh melalui reduksi data, yakni memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, dengan tujuan dapat memberi gambaran tentang hasil pengamatan.

Display data juga akan mengambil bagian yang utama dalam rangka penyajian.

D. Pembahasan

3.1.1 Tata Kelola

Berdasarkan penelitian dilapangan yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2017, banyaknya manfaat dari kemitraan yang tidak berjalan seperti:

1. Tidak tersedianya alternatif sumber pembiayaan
2. Kurangnya peran swasta dalam menyumbangkan modal dan kemampuan manajerial
3. Kurangnya infrastruktur yang disediakan.
4. kinerja layanan yang belum membaik.

3.1.2 Promosi

Dari ke-58 potensi objek wisata di kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan objek wisata air terjun guruh gemurai sebagai wisata unggulan di kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan keputusan bupati Kuantan Singingi nomor 556 tahun 2009 karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata
2. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum
3. Aksesibilitas
4. Potensi pasar
5. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.

Melihat objek wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap objek wisata yang ada karena apabila objek wisata tersebut mampu dikembangkan dengan baik maka hal ini dapat berpengaruh terhadap kelestarian wisata alam, perkembangan kepariwisataan serta

berpengaruh terhadap masyarakat dan bagi daerah.

3.2 Program Pengembangan Pariwisata Daerah Kuantan Singingi

Dalam rangka mencapai suatu tujuan maka dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten Kuantan Singingi memiliki beberapa program yang dilakukan di objek wisata yang yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Program pengembangan destinasi pariwisata

Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada agar PAD yang didapat dari objek wisata ini meningkat. Sarana dan prasarana wisata merupakan unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Sarana dan prasarana wisata ini akan mempengaruhi tingkat pengunjung, karena apabila suatu objek wisata memiliki sarana dan prasarana yang lengkap maka akan membuat membuat pengunjung lebih nyaman untuk berkunjung.

3.2.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pelengkap wisatawan

Dari hasil observasi di lapangan pembangunan sarana dan prasarana pokok ini memang mengalami peningkatan, namun sarana dan prasarana tersebut masih belum tersedia semuanya. Musholla yang seharusnya digunakan untuk beribadah sudah tidak bisa digunakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Keadaan musholla sangat kotor dan tidak terurus. Selain itu pengadaan toilet dan ruang ganti untuk para wisatawan juga sangat diperlukan, karena kamar mandi/ toilet juga dapat menunjang kenyamanan para wisatawan. Saat ini

sudah ada beberapa toilet dan ruang ganti yang telah dibangun namun tidak bisa digunakan. Hal ini sangat menyulitkan bagi para wisatawan karena jika para wisatawan mandi di sekitar air terjun maka untuk mengganti pakaian sangat sulit.

3.2.3 Meningkatkan sarana penunjang kepariwisataan

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan souvenir yang bisa dibawa pulang dari wisatawan belum ada. Saat ini di objek wisata air terjun guruh gemurai telah dibangun 10 kios untuk tempat penjualan oleh-oleh, kios ini dibangun oleh pemerintah provinsi Riau namun sampai sekarang belum dapat difungsikan karena belum ada serah terima dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi. Karena itu kios ini belum dapat difungsikan.

3.3 Analisis Public Private Partnership dalam pengembangan pariwisata daerah Kuantan Singingi

3.3.1 Kompetisi

Kompetisi yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengupayakan pariwisata yang ada di Kuantan Singingi khususnya Event Budaya Pacu Jalur mampu bersaing dengan wisata-wisata yang ada di Indonesia,

3.3.2 Kooperasi

Dalam hal ini masyarakat hendaknya dapat ikut menciptakan suasana sapa pesona yaitu tujuh kondisi yang harus diciptakan pada suatu kawasan objek wisata atau daerah tujuan wisata. Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi program pengembangan pariwisata yang ada dalam *Public Private Partnership* (Kerjasama Pemerintah - swasta) dalam pengembangan potensi pariwisata di

Kabupaten Kuantan Singingi. Pembangunan pariwisata memerlukan modal. Modal ini dapat berasal dari pemerintah maupun swasta. Dalam situasi ini dimana pemerintah terpaksa harus bekerja dengan sumber daya yang amat terbatas, sangatlah diharapkan pihak swasta dapat berperan lebih besar dengan ikut mendanai pembangunan berbagai prasarana, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan objek atau daerah tujuan wisata.

3.3.3 Koordinasi

Melihat dari dokumentasi dan hasil wawancara peneliti diketahui tidak semua pegawai yang ada di dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten Kuantan Singingi yang berlatar pendidikan dibidang pariwisata, Untuk mengembangkan pariwisata alam di suatu daerah mutlak diperlukan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Peran serta aktif masyarakat dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, peran serta pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam.

3.3.4 Kolaborasi

Upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Kuantan Singingi juga membutuhkan dukungan penuh dan partisipasi dari masyarakat karena masyarakat di sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka yang

menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum melaksanakan konsep *Public Private Partnership* (Kemitraan pemerintah-swasta) dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang baik sehingga menyebabkan kurangnya wisatawan yang berkunjung
3. Promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi tentang event pariwisata pacu jalur dan objek wisata lainnya yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi terhadap masyarakat mengenai budaya dan tradisi, serta keindahan event pacu jalur yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luar daerah dan luar kota.
4. Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya, Hal ini bisa kita lihat dari beberapa strategi yang ada seperti meningkatkan sarana dan prasarana baik pokok maupun penunjang, promosi langsung maupun tidak langsung serta bekerja dengan masyarakat, Dari ketiga strategi tersebut belum ada yang dilaksanakan

secara maksimal, sangat kurang dalam pelaksanaannya.

F. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dibawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus lebih tegas dan serius lagi dalam membenahi sektor pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus segera menerapkan konsep *Public Private Partnership* (Kemitraan pemerintah-swasta) dalam pengembangan sektor pariwisata agar terwujudnya keinginan dari masyarakat dan cita-cita bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus mampu membuat sebuah peraturan – peraturan yang nantinya memberikan kewajiban kepada Perusahaan yang beroperasi di kuantan Singingi untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

G. Daftar Pustaka

1. Buku :

Angga, Dede. 2006. *Kemitraan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan (suatu studi tentang kasus kemitraan sektor kehutanan di Kabupaten Pasuruan)*. Jurnal aplikasi

- manajemen volume E.Guyer Freuler
- Lidenberg M De A dan Bill Bramwell (2002) *kemitraan dibidang perencanaan dalam pembangunan pariwisata regional di Brazil bagian utara*,
- Mahmud Khalid, 2001. “*Shanghai Cooperation Organization: Beginning of A NewPartnership*”, *Regional Studies*, Vol XX, No.1, winter, pp 3-18.
- Mazmanian Daniel A and Sabatier Paul A, 1983.*Implementation And Public Policy*, Foresman Company, California.
- Meleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh . 2003. *Metode Penelitian*, PT. ghaliaIndonesia : Jakarta
- Nor’Ain Othman (2003) *Aliansi Marketing dan Jejaring antara Organisasi Pariwisata Nasional (NTO) dan organisasi swasta non privat di Malaysia*.
- Savas, E.S, 2000. *Privatization And Public Private Partnerships*, Catham House Publisher, Inc, New Jersey.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar – Dasar Pariwisata*. Andi : Yogyakarta
- Supraptini (2003) *pengembangan pola kemitraan dalam peningkatan sanitasi pengelolaan makanan di daerah objek wisata Bali*.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, pariwisataa
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisata nasional
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

2.

2. PeraturanPerundang-undangan:

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2009 Tentang Usaha
kepariwisataan

3. SumberLainnya :

http://Riauinvestment.com/index.php?com=isi&id_news=322 pada
27 januari 2017 pukul 19.06

http://www.Riau.go.id/index.php?mod=halutama&link=sektor_pariwisata pada 28 januari 2017, pukul
20.19 wib

<http://www.Sungaikuantan.com/2009/02/air-terjun-guruh-gemursi-wisata-alam.html> pada 03
ferbruari 2017, pukul 13.09
wib